

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA
KABUPATEN/KOTADI PROVINSI
JAWA TIMUR**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program
Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi**



Oleh :

DENNY TIRTA PRADANA

NIM: 2012310624

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Denny Tirta Pradana
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 04 Juli 1993
N.I.M : 2012310624
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
J u d u l : Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : ...7 September 2017

Divyah Pujiati S.E., M.Si

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Tanggal : ...7 September 2017

Dr. LUCIANA SPICA ALMILIA, S.E., M.Si, OIA., CPSAK

Effect of Local Revenue and the General Allocation Fund Against Capital Expenditure By Economic Growth As moderating variables In District / Municipality in East Java Province

Denny Tirta Pradana
STIE Perbanas Surabaya
Email: dennynash06@gmail.com
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This study aims to investigate the influence of local revenue and general allocation funds towards capital expenditure with economic growth as moderating variables. This research was conducted in counties and cities in East Java with a population of 38 regions. This research uses budget realization report APBD and the PDRB Table periode 2011-2013 as the sample. The sampling method used purposive sampling according to criteria that have been determined. The number of samples collected as many as 66. The data were analyzed using data analysis first conducted classical assumption test before hypothesis test. Testing the hypothesis in this study using analytical techniques Moderate Regression Analysis (MRA) with f test, R^2 and t -test. The results of this study indicate that the local revenue and general allocation funds and significant positive effect on capital spending. Moderating variables (economic growth) is able to moderate the general allocation fund variable, but are not able to moderate variable local revenue on capital expenditures.

Keywords: revenue, general allocation funds, economic growth, capital expenditures.

PENDAHULUAN

Proses globalisasi pemerintahan pada daerah Indonesia di tahun 2001 memasuki zaman baru otonomi daerah telah diberlakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah revisi ulang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan tentang kewajiban, wewenang, dan hak daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah otonomi daerah (Karin, 2015).

Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Sistem pembagian keuangan yang efisien, proposional, adil, transparan, demokratis, dan dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan. Otonomi daerah yang terjadi bukan hanya penyerahan tugas pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah tetapi juga dengan disertai pelimpahan wewenang untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri (Karina, 2015). Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih

mengembangkan potensi daerahnya. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan untuk belanja modal yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Perbedaan kemampuan keuangan di setiap daerah, dalam hal pembelanjaan kegiatan pemerintahannya, sehingga terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Pemerintah daerah berupaya dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk belanja kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi (Ni Putu, 2014). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang sejalan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga daerahnya disebut dengan Dana Alokasi Umum. Ni Putu (2014) yang melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di provinsi Bali memperoleh hasil dimana terdapatnya pengaruh positif dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) memperoleh hasil bahwa tidak terdapatnya pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal. Kondisi ini dikarenakan dana alokasi umum yang diterima oleh daerah hanya untuk membiayai pengeluaran rutin saja, seperti

untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Berdasarkan perkembangan yang berada di Provinsi Jawa Timur pada alokasi proporsi belanja modal lebih sedikit dibandingkan dengan alokasi belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang. Hal ini yang mengakibatkan belanja modal sangat minim dan tidak dapat maksimal. Padahal dari belanja modal tersebut yang akan mendatangkan manfaat yang lebih banyak bagi daerah dan meningkatkan pelayanan publik, data tersebut diperoleh dari data laporan APBD yang dapat diakses pada website direktoral jendral perimbangan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Akuntansi Dana (*Fund Accounting*)

Akuntansi Dana (*Fund Accounting*). Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya memiliki keterbatasan penggunaan dengan tujuan atau aktivitas tertentu. Organisasi sektor publik memiliki tujuan-tujuan yang spesifik. Akuntansi dana merupakan salah cara alternatif sistem akuntansi pada sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Disektor publik, dana kas cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik. Jadi, sistem akuntansi harus memprioritaskan pada pengelolaan dana kas. Saat ini dalam

akuntansi dana, “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan di dalamnya.

Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan otonomi daerah kewajiban, hak, dan wewenang daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, kesejahteraan, masyarakat, meningkatkan potensi daerah secara optimal, meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan tentunya kemandirian keuangan daerah adalah tujuan otonomi daerah dalam undang-undang.

Bastian (2006:338) menyatakan asas-asas penting otonomi daerah dalam undang-undang tersebut antara lain:

- 1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- 2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah,
- 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan memper tanggung jawabkannya kepada yang menugaskan,

- 4) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Adi (2013:7) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup pada organisasi yang terkait dengan pelayanan pada publik. Ruang lingkup akuntansi sektor publik terdiri dari:

- a. Pemerintahan, baik pusat dan daerah.
- b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).
- c. Yayasan.
- d. Koperasi.
- e. Organisasi politik
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- g. Universitas
- h. Tempat peribadatan atau organisasi keagamaan.
- i. Organisasi nirlaba lainnya.

Pelayanan kepada publik mengarah pada pelayanan pada masyarakat tanpa berorientasi pada keuntungan. Apabila berorientasi pada keuntungan, penentuan tingkat keuntungan ditentukan oleh eksekutif yang disetujui oleh legeslatif, seperti Pertamina, PLN, PDAM dan lainnya. Hal tersebut, polanya cenderung mengikuti mekanisme pasar.

Anggaran Sektor Publik

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas. Proses organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan dan perencanaan strategik telah dilakukan. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahanan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses tersebut akan efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas kusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol kegiatan dan pengendalian anggaran (Mardismo, 2002:61)

Anggaran publik berisi tentang perencanaan kegiatan yang dijelaskan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja. Bentuk anggaran sektor publik yang paling sederhana merupakan suatu dokumen yang menggambarkan keadaan keuangan dari suatu organisasi mencakup aktivitas, pendapatan dan belanja (Mardismo, 2002:62).

Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Modal (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diartikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu (Halim, 2002:16).

Menurut Halim (2002) Adapun unsur-unsur APBD sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minim untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaranyang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Keuangan daerah dapat diaetikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula sesuatu segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Ada dua hal yang dijelaskan dari definisi tersebut, yaitu:

- a. Semua hak adalah memungut sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain dan hak untuk menerima dana lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan.

Kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, insfratuktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap serta aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2007:101). Pembangunan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian sehingga dapat menciptakan insfrastruktur yang banyak, perusahaan menjadi semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi serta teknologi semakin meningkat. Sebagai suatu proses, pembangunan ekonomi berhubungan dengan perubahan dalam komposisi dari input dan output dari ekonomi.

Belanja modal merupakan suatu satu pengeluaran yang dapat artikan sebagai pengeluaran rutin untuk pembentukan modal yang ada. Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang

sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat di daerah, pembelanjaan modal terdiri dari berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang terus ditingkatkan agar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah. UU RI No.33 tahun 2004 pasal 3 tentang perimbangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi pendapatan daerah sebagai pewujudan desentralisasi.

Berdasarkan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, pendapatan asli daerah yaitu:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 33

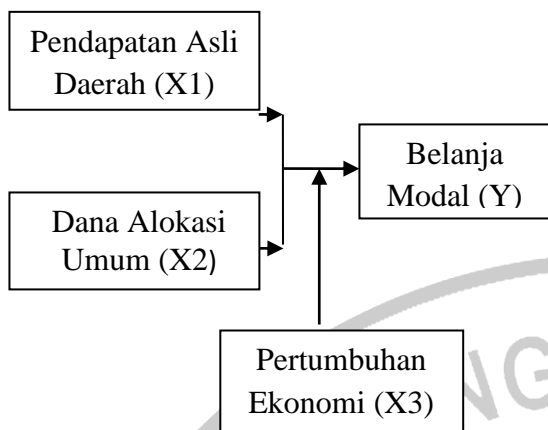
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian diberikan kepada daerah dengan asumsi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang akan

mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah (Ahmad Yani, 2008: 142). Pemerintah pusat berharap dengan adanya desentralisasi pada daerah bisa mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lin Liu (2000), Sheila (2012), Pungky (2011) maupun dengan Darwanto dan Yulia (2007) hasil DAU mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum yang selanjutnya disebut DAU menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi diartikan sebagai proses dalam jangka panjang yaitu kenaikan output per kapita (Boediono, 1981:1). Perkembangan perekonomian yang bagus adalah titik dimana keseimbangan antara permintaan jumlah permintaan total terhadap barang dan jasa dalam perekonomian selama periode tertentu dan jumlah produksi barang dan jasa dalam perekonomian selama periode tertentu, Adam Smith adalah tokoh aliran klasik yang mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menyatakan bahwa yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi yaitu, teknologi, barang modal dan uang. Faktor non ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah faktor sosial dan politik.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
- H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.
- H3 : Pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi antara Pendapatan Asli daerah dengan belanja modal.
- H4 : Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi antara Dana Alokasi Umum dengan belanja Modal.

METEDOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan tujuan tentang penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2011-2013. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data sekunder.

Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Indikator variabel dari belanja modal yaitu Belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset lainnya.

Variabel Independen

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel independent yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.

- a. Variabel pendapatan asli daerah pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: pendapatan asli daerah yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Indikator variabel PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Variabel dana alokasi umum Menurut Siti fatmawati (2013) dalam Halim (2009) Dana Alokasi Umum adalah dana berasal yang dari APBN, yang dialokasikan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerah. Dalam penelitian ini Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat dari Laporan Raelisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang di upload situs direktorat jendral perimbangan keuangan dengan satuan rupiah. Indikator variabel dana alokasi umum yaitu dana transfer umum.

Variabel pemoderasi

Dalam penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independent terhadap dependen, variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yakni: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan suatu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dari PDRB atas harga konstan.

Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintahan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dari tahun 2011-2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Teknik penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur dengan kriteria: kabupaten/kota yang melaporkan data mengenai PAD dan DAU dan belanja modal pada laporan APBD tahunan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah 2011 hingga 2013. Data sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Jawa Timur yaitu 38 kabupaten/kota.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi persyaratan lolos dari asumsi klasik, data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas (Diah, 2011). Untuk itu, sebelum melaksanakan pengujian terhadap regresi linier berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu, yaitu:

Uji Normalitas

Tujuan dari pengujian normalitas ini untuk mengetahui apakah data yang dipakai telah terdistribusi normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini memakai analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot. Dapat dikatakan normal apabila data dan titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Apabila hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan hasil di bawah signifikan 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas mempunyai tujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* dapat mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $Tolerance < 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2006).

Apabila terjadi gejala multikolonieritas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih model yang baik (Purbayu, 2005).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variancet* tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas jika ada perbedaan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi perbedaan (Ghozali, 2006). Hasil uji ini adalah bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian dilakukan uji gelsjer dengan analisis jika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel dan nilai variabel bebas memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai t-hitung lebih besar dan nilai setiap variabel bebas memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka pada uji glesjer tersebut di indikasikan terjadi hekteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autikorelasi juga diartikan sebagai korelasi yang terjadi di para anggota-anggota dari serangkaian obserasi yang berderetan waktu (jika waktunya berurutan) atau korelasi antar tempat berdekatan (apabila cross sectional). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi Inier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan pengguna pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi

maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2006).

PENGUJIAN HIPOTESIS

Analisis regresi moderasi

Moderated Regression Analysis (MRA)

berbeda dengan analisis sub-kelompok, karena menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan identitas sample dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel mediator (Ghozali, 2011). Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel independen, 1 (satu) variabel moderasi, dan variabel dependen. Karena itu, digunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen. Membuat regresi interaksi dengan persamaan regresi yang diperoleh melalui *Moderated Regression Analysis* (MRA) yaitu:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_3 + b_4X_2X_3 + e$$

Keterangan :

Y = variabel dependen (belanja modal)
 α = konstanta
 b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi
 X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)
 X_3 = variabel moderasi (Pertumbuhan Ekonomi)
e = faktor error

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil analisis statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* test menunjukkan besarnya nilai signifikansinya sebesar 0,973 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 artinya memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi

Uji Autokorelasi

Hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai DW adalah 1,983, nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n) 66 dan jumlah variabel independen 2 ($k=3$), maka di tabel Durbin Waston didapatkan nilai batas bawah (dl) sebesar 1,50 dan nilai batas atas (du) sebesar 1,69. Berdasarkan dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai DW 1,983 lebih besar dari nilai batas atas (du) 1,66 dan kurang dari $4 - 1,66$ ($4-du$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau dengan kata lain tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

Uji heteroskedestisitas

Hasil analisis dari uji glesjer bahwa nilai setiap variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar 0,05 dan t -tabel sebesar 1,998. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Uji Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi

sebagai variabel pemoderasi pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Adapun hasil pengujian melalui bantuan SPSS versi 20 sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji F, dapat dijelaskan bahwa F hitung sebesar 185,762 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05. Besarnya Adjusted R^2 adalah 0,934, hal ini berarti memiliki nilai 93,4% perubahan belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, Pertumbuhan Ekonomi dan pemoderasi. Sedangkan sisanya 6,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Hasil uji t dapat dilihat dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk pendapatan asli daerah 0,008 menunjukkan bahwa lebih kecil dari tingkat sig . Sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Sedangkan dana alokasi khusus memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa lebih kecil dari tingkat sig sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil untuk variabel pemoderasi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal memiliki nilai sebesar 0,628 yang lebih besar dari 0,05. Hasil dari moderasi dana alokasi umum terhadap belanja modal memiliki nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05.

Pada bagian ini akan dibahas analisis terhadap hasil temuan teoritis. Pembahasan dilakukan berdasarkan pada temuan empiris maupun teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, akan diuraikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap belanja modal.

Pada variabel pendapatan asli daerah tersebut dapat diukur dengan tingginya jumlah penerimaan daerah yang didapat maka semakin tinggi tingkat kemandirian setiap daerah. Penerimaan asli daerah menjadi sumber utama pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai sumber pendapatan maka dapat digunakan sebaik

mungkin dan mengalokasikannya terhadap belanja modal, maka dana pendapatan asli daerah yang diperoleh pada suatu daerah semakin besar maka pengalokasian belanja modalnya semakin besar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan secara individu variabel PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Ni Putu dan Ni Luh (2014) yang menyatakan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan pelayanan publik dan menunjang pertumbuhan ekonomi sebagaimana untuk mewujudkan semua itu seharusnya pemerintah daerah menggunakan dana alokasi umum untuk pengalokasian belanja modal, pemerintah daerah melakukan investasi untuk mendatangkan manfaat yang bisa mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan secara individu variabel DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Ni Putu dan Ni Luh (2014) yang menyatakan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Variabel pemoderasi pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi PAD terhadap belanja modal Hal tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel pemoderasi pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal, yang berarti H3

ditolak. Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis* tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel pemoderasi. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Ni Putu dan Ni Luh (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan alokasi belanja modal tetapi dengan koefisien negatif atau intensitas dan arah yang berlawanan.

Variabel pemoderasi pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh antara DAU terhadap belanja modal. Bahwa pengujian dari *Moderated Regression Analysis* tersebut menunjukkan hasil signifikan, hal tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel moderasi pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan antara dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal, yang artinya H4 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan peneliti sebelumnya Ni Putu dan Ni Luh (2014) yang menunjukkan hasil yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi hubungan dana alokasi umum terhadap belanja modal, berarti jika ada peningkatan pertumbuhan ekonomi maka pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal semakin tinggi.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Pemoderasi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dan pembahasan, maka diperoleh hasil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Hasil dari pengujian hipotesis pertama adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal; 2) Hasil dari

pengujian hipotesis kedua adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal; 3) Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan antara PAD terhadap Belanja Modal; 4) Hasil dari pengujian hipotesis keempat yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan antara DAU terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain yaitu Penelitian ini berdasarkan data sekunder yang diambil dari situs direktorat jendral perimbangan keuangan daerah, tidak berdasarkan observasi sehingga kurang dapat digali lebih dalam tentang pengalokasian anggaran pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim dan Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupatendan Kota di Jawadan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25
- .Abdul, Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* (Vol. 2 No. 2 November 2006) Halaman 17-32.
- _____, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aschauer, D.A. 1989. "Is Public Invesment Productive?." *Journal of Monetary Eeconomics*. Vol. 23. 177-200.
- Bataineh, Ibrahem Mohamed Al. 2012. *The Impact of Government Expenditures on Economic Growth in Jordan*. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*.
- Barro, R.J. 1991. Economic Growth in a Cross Section of Countries. *Quarterly Journal of Economic*. Vol. 407-443.
- Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFU-UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Universitas Gadjah Mada.
- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi ke 2. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.

Saran Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, berdasarkan pada hasil penelitian, analisis, dan pembahasan, kesimpulan yang diambil dan keterbatasan penelitian, maka dapat diajukan saran penelitian selanjutnya sebagai berikut: 1) Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan populasi dari seluruh provinsi-provinsi di seluruh Indonesia; 2) Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan data dengan rentan periode waktu penelitian hingga tahun 2015 karena penulis tidak mendapatkan data tahun tersebut yang disebabkan belum terpublikasinya data tersebut; 3) Penelitian berikutnya juga diharapkan menambah variabel yang dapat mempengaruhi belanja modal dan dapat menggunakan variabel pemoderasi selain pertumbuhan ekonomi.

- Choilil, Inayah. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten Di Jawa Timur". STIE Perbanas Surabaya.
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- I Putu Nugrah, Dwirandra., "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92
- Imam Ghozali. 2006. Aplikasi analisis multivarian dengan program spss. Edisi 4. Badan penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Karin Ekky. 2015. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kusnandar & Dodik Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Journal Economic Development and Cultural Change* Chicago. Vol. 49 Hal. 1-21.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Muritala, T., & Taiwo, A. (2011). Government expenditure and economic development: Empirical evidence from Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 3(9), 18-28.
- Ni putu dwi eka, Ni luh supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SLIPA pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 477-495.
- Nikos Benos. 2009. Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from EU Countries. *Journal. University of Ioannina*.
- Nugroho, Fajar. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Nurin Hidayati. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pascual, M and Alvares-Garcia, S. 1994. "Government Spending and Economic Growth in The European Countries : An Empirical Approach." *Journal*.

- Paujiah, Sri Puji. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. Universitas Siliwangi.
- Prakosa, K. B. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 8: 101-118.
- Putro, Nugroho Suratmo & Pamudji, Sugeng. 2011. Pengaruh Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Taiwo, Muritala dan Taiwo Abayomi. 2011. Government Expenditure and Economic Development. <http://www.bps.go.id>. (diakses tanggal 24 maret 2016)
- Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Ram, R. 1986. Government Size and Economic Growth: A New Framework and some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data. *Journal American Economic Review*, 76. 191-203.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- European Journal of Business and Management. Vol. 3(9)
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), h:142-155.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id> (diakses tanggal 24 maret 2016)